



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**UPTD SMP NEGERI 2 TAROKAN**  
**PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL**  
**TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022**

**PETUNJUK UMUM**

1. Periksa Naskah Soal yang Anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi :
  - a. Kelengkapan jumlah halaman dan urutannya.
  - b. Kelengkapan nomor soal dan urutannya.
  - c. Kesesuaian Mata Pelajaran yang di ujikan dengan Mata Pelajaran yang tertera pada Naskah maupun Lembar Jawab.
  - d. Jumlah soal setiap mapel 45 soal, terdiri PG 15 soal, PGK 5 soal, BS 10 soal, menjodohkan 10 soal, Uraian 5 Soal kecuali IPA dan MATEMATIKA 35 soal, terdiri PG 5 soal, PGK 5 soal, BS 10 soal, menjodohkan 10 soal, Uraian 5 soal.
2. Laporkan Kepada pegawai ruang apabila terdapat naskah soal yang tidak lengkap, tidak urut, Lembar Jawaban yang rusak dan minta gantinya!
3. Gunakan pensil 2B untuk mengisi lembar jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tuliskan Nama Anda pada kolom yang disediakan.
  - b. Tuliskan Nomor Peserta Penilaian Akhir Semester Gasal pada kolom yang disediakan!
  - c. Tuliskan Kelas / No. Presensi, pada kolom yang disediakan!
  - d. Tulislah paket soal pada lembar jawaban sesuai paket soal!
4. Jika terjadi kesalahan dalam memberi tanda silang (x) atau centang (✓), hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus kemudian diganti yang menurut anda benar.
5. Saat mengikuti ulangan dilarang membawa dan menggunakan HP, Kalkulator, Tabel, maupun alat bantu hitung lainnya.
6. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan pengawas ujian!
7. Lembar Jawaban tidak boleh dicorat – coret.
8. Berdo'alah sebelum mengerjakan soal!
9. Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin akhlaq mulia!
10. Gunakan waktu yang terjadwal dengan sebaik-baiknya agar diperoleh hasil yang maksimal!

SELAMAT MENGERJAKAN SEMOGA SUKSES



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**UPTD SMP NEGERI**  
**PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL**  
**TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Mata Pelajaran : PPKn  
Kelas/Semester : IX / 1

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Desember 2021  
Waktu : 60 menit

**I. Soal Pilihan Ganda**

**Petunjuk:**

*Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D dilembar jawaban yang telah disediakan.*

1. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL pada tanggal 15 Januari 1949 yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Siapakah tokoh yang berada di balik APRA?
  - A. Christian Robert Steven Soumokil
  - B. Raymond Westerling
  - C. Ventje Sumual
  - D. Douwes Deker
2. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harián Bernas Yogyakarta, dan lain-lain adalah merupakan kasus dan peristiwa yang muncul pada masa kepemimpinan Soeharto yang dikenal pada masa ...
  - A. Awal Kemerdekaan.
  - B. Orde Lama
  - C. Orde Baru
  - D. Reformasi
3. Sampai kapanpun nilai-nilai Pancasila harus dijaga dengan baik. Namun dalam perjalanannya muncul berbagai gerakan yang merongrong kemurnian Pancasila, seperti separatisme, radikalisme dan terorisme. Dinamika tersebut terjadi dan berlangsung pada masa ...
  - A. Awal kemerdekaan
  - B. Orde Lama
  - C. Orde Baru
  - D. Reformasi
4. Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya, dengan pernyataan tersebut maka Pancasila dapat digolongkan dalam dimensi ...
  - A. Idealisme
  - B. Normatif
  - C. Optimis
  - D. Realitas

5. Perhatikan data berikut :

1. Sistem pemikiran yang terbuka
2. Nilai-nilai dan cita-citanya bukan dari luar
3. Diciptakan oleh negara
4. Dasar pembentukan ideologinya hasil musyawarah
5. Senantiasa berkembang sesuai aspirasi pemikiran.

Dari data di atas yang termasuk ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka ditunjukkan pada ...

- A. 1,2,3 dan 4
- B. 1,3,4 dan 5
- C. 1,2,4 dan 5
- D. 2,3,4 dan 5

6. Perwujudan Pancasila di bidang ekonomi dikembangkan melalui landasan operasional sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal ...

- A. 33
- B. 34
- C. 35
- D. 36

7. Perhatikan gambar di samping :

Kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh PMI seperti tampak pada gambar adalah merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada pelaksanaan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila pada sila ke...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4



8. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penindasan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu ...

- A. Keadilan
- B. Persatuan
- C. Kerakyatan
- D. Kemanusiaan

9. Perhatikan pernyataan berikut :

- (1) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
  - (2) Mengembangkan rasa cinta tanah air
  - (3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat
  - (4) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
  - (5) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
- Dari pernyataan di atas, aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan dengan perilaku pada nomor ...

- A. (1) dan (2)
- B. (2) dan (3)
- C. (3) dan (4)
- D. (4) dan (5)

10. Perhatikan kalimat berikut :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”

Kalimat pada Pembukaan UUD NRI tahun 1945 di atas mengandung makna ...

- A. Bangsa Indonesia hendak mengembangkan toleransi antar umat beragama
- B. Bangsa Indonesia meyakini adanya hak kodrat dan moral yang dimiliki setiap individu
- C. Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan dalam menentukan keyakinan setiap warganegaranya
- D. Memberikan pengakuan terhadap adanya nilai religius yang dimiliki bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan Indonesia.

11. Perhatikan/cermati teks dalam kotak disamping. Di bawah ini yang **bukan** termasuk makna alinea dimaksud adalah ...

- A. Penghargaan atas hadiah kemerdekaan yang diperoleh.
- B. Keinginan mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia.
- C. Adanya hasrat yang kuat untuk menentukan nasib sendiri.
- D. Penghargaan atas perjuangan Bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

12. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Tiap alinea mengandung dan mempunyai pokok-pokok pikiran dan setiap pokok pikiran yang terdapat dalam alinea bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ini yang merupakan penerapan pokok pikiran Persatuan adalah ...

- A. Siska dan Aldo berangkat sekolah naik angkot.
- B. Ayah memberikan kado ulang tahun sepeda kepada si sulung.
- C. Joan, Vivian dan Nico mengerjakan tugas kelompok dengan baik.
- D. Bu Nani memberikan tugas kelompok untuk mewawancarai tokoh masyarakat.

13. Perhatikan gambar berikut :

Aksi yang terdapat pada gambar adalah merupakan bentuk perwujudan demokrasi, namun aksi tersebut seringkali memicu kerusuhan karena disusupi oleh oknum tertentu. Berikut adalah cara meminimalkan terjadinya tindak kekerasan ...

- A. Menulis kritik dan saran
- B. Menulis artikel provokatif dimedia massa
- C. Memposting status diberbagai media sosial
- D. Mengirim surat kepada wakil rakyat di pemerintahan.



14. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Ketika rakyat diminta datang langsung ke TPS untuk memberikan hak suaranya berarti di dalam pemilu menggunakan asas ...

- A. Adil
- B. Jujur
- C. Umum
- D. Langsung

15. Bacalah teks berikut :

*“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,...”*

Berdasarkan teks diatas, maka bisa diketahui bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan...

- A. Tuhan
- B. Rakyat
- C. Negara
- D. Hukum

## II. SOAL PILIHAN GANDA KOMPLEKS

Petunjuk :

- ❖ Untuk menjawab soal nomor 16 sampai 20 baca dan cermati wacana di bawah ini !
- ❖ Pilihlah dua jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A,B,C,D dilembar jawaban yang telah disediakan.

Jakarta, CNN Indonesia -- DPR mengusulkan pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang digelar serentak kembali seperti perhelatan Pemilu 2019 lalu. Hal itu tertuang dalam draf revisi Undang-undang Pemilu yang disusun anggota dewan.

Draf revisi UU Pemilu tersebut sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021 dan akan dibahas dengan pemerintah.



Pasal 475 ayat (1) draf revisi UU Pemilu menjelaskan bahwa pemungutan suara pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota dan DPD atau Pemilu Nasional dilaksanakan pada hari yang sama.

"Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan pada hari yang sama," bunyi draf RUU Pemilu dikutip CNN Indonesia.com, Kamis (28/1). Waktu pelaksanaan Pemilu 2024 akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak penyelenggara. "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU," bunyi Pasal 475 ayat (3).

Rancangan aturan itu sama dengan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang masih berlaku saat ini. UU Pemilu itu pula yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Pada Pemilu 2019, pemungutan suara Pilpres, Pileg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Guspari lantas menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 55/PUU-XVII/2019. Menurutnya, keputusan tersebut menegaskan bahwa keserentakan pemilu berarti menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR serta DPD. Keanggotaan MPR terdiri atas DPR dan DPD. Sehingga, tertutup peluang untuk memisahkan pilpres dengan pileg. "Keputusan MK keserentakan itu digariskan pada Pilpres DPR dan DPD. Keserentakan di situ pada hari yang sama," kata Guspari.

Senada, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut putusan MK itu dimaknai pemilu presiden, DPR dan DPD harus dilakukan secara serentak dalam waktu yang bersamaan.

Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128154316-32-599588/draf-ruu-pemilu-pemilu-2024-serentak-lagi-seperti-2019>.

16. Berdasarkan wacana di atas, maksud dari pernyataan LUBER adalah...
- A. Langsung
  - B. Bersih
  - C. Umum
  - D. Ramah
17. Berdasarkan wacana di atas, pemilu serentak yang dilaksanakan memenuhi kriteria sesuai UU No.... Tahun ...
- A. 1
  - B. 7
  - C. 2017
  - D. 2019
18. Berdasarkan wacana di atas, pemilu serentak yang dimaksudkan adalah untuk memilih ...
- A. MPR
  - B. DPR
  - C. BPK
  - D. Presiden
19. Berdasarkan wacana di atas, keanggotaan MPR terdiri dari ...
- A. MA
  - B. BPK
  - C. DPR
  - D. DPD
20. Berdasarkan wacana di atas, tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah untuk memilih keanggotaan badan legislatif yaitu ...
- A. KPK
  - B. Presiden
  - C. DPRD Kab/Kota
  - D. DPRD Provinsi

**III. Soal Benar / Salah.**

Jawablah soal nomor 21 sampai dengan 30 di bawah ini, dengan cara memilih jawaban ( B ) bila pernyataan benar, dan memilih ( S ) bila jawaban pernyataan salah.

NO	PILIHAN JAWABAN	PERNYATAAN
21	( B – S )	Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Sukarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara,tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh,serta badan konstituante gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang – Undang Dasar Negara RI tahun 1945
22	( B – S )	Suatu ideologi,selain memilik aspek – aspek yang bersifat ideal berupa cita – cita,pemikiran – pemikiran,serta nilai – nilai yang dianggap baik,juga harus memiliki norma yang jelas.Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata.Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi yaitu Dimensi idealisme, normatif dan realitas.

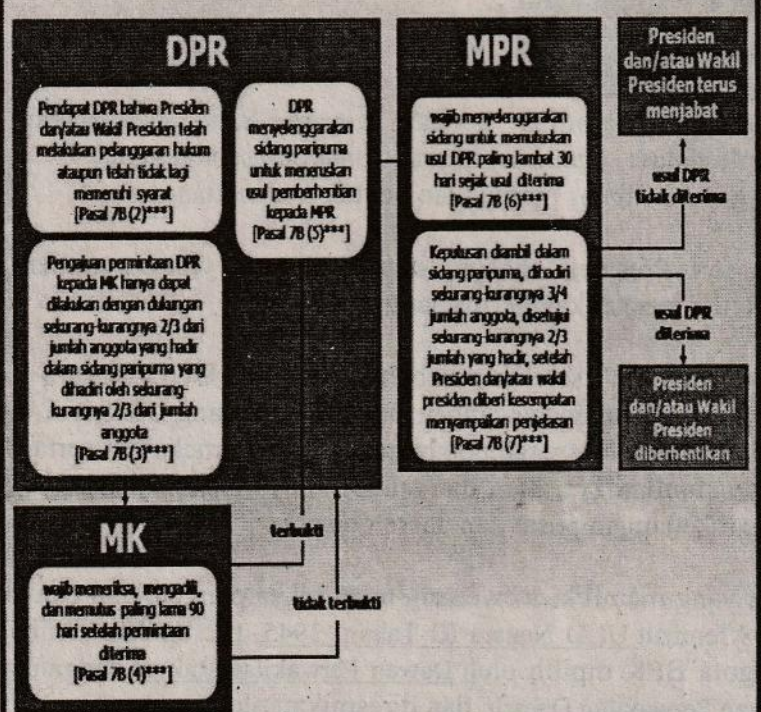
23	(B – S)	Pancasila sebagai ideologi tertutup ,memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai – nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah.Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat
24	(B – S)	Alenia pertama Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 memuat dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dnegan peri kemaunisa dan perikeadilan.Penjajahan bertentangan dengan nilai – nilai kemausiaan,karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama.
25	(B – S)	Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara atau kekuasaan untuk mengatur pemerintahan sendiri dengan mempertimbangkan masukan dari negara lain. Sedangkan kedaulatan dari segi eksternal atau disebut kedaulatan ke luar adalah kedaulatan dari segi eksternal Contoh pelaksanaan kedaulatan kedalam yaitu memilih anggota DPD dan juga DPR dalam rangka pemilihan umum,pemilihan dari beragam jenis kepala daerah seperti Bupati maupun walikota yang dilangsungkan pada pilkada oleh rakyat, memilih presiden beserta wakil presiden sedangkan contoh kedaulatan keluar misalnya mendirikan kedutaan besar di Malaysia dan beberapa Dubes RI lainnya untuk beragam kasus seperti TKI.
26	(B – S)	Selain menganut teori kedaulatan rakyat,Negara RI di pertegas dengan kedaulatan hukum.Hal ini terlihat jelas pada pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD Negara RI Tahun 1945
27	(B – S)	Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifatmandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada 13 Agustus2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan MPR
28	(B – S)	Mahkamah Agung bertugas menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap undang – undang. MA berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang – undang, seperti PP,Perpres,Perda bahkan peraturan sekolah dengan undang – undang
29	(B – S)	Susilo Bambang Yudhoyono adalah <u>Presiden Indonesia keenam</u> yang menjabat sejak <u>20 Oktober 2004</u> hingga <u>20 Oktober 2014</u> . Beliau adalah Presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum. Beliau, bersama <u>Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla</u> , terpilih dalam <u>Pemilu Presiden 2004</u> . Ia berhasil melanjutkan

		pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan <u>Pemilu Presiden 2009</u> , kali ini bersama Wakil Presiden <u>Boediono</u> . Sejak <u>era reformasi</u> dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.
30	(B – S)	Presiden dan DPR merupakan dua lembaga tinggi negara yang berbeda, tetapi mempunyai kedudukan yang sejajar. DPR dalam menjalankan tugas legislatif merupakan partner dari Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis tertinggi, telah mengatur adanya hubungan tata kerja antara Presiden dan DPR yang dirumuskan dalam bentuk kerjasama menyelenggarakan tugas legislatif, yaitu membuat Undang-Undang (UU) dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

#### IV. Soal Menjodohkan.

Kerjakanlah soal 31 sampai 40 dibawah ini dengan cara menjodohkan dengan pilihan jawaban yang tersedia di sebelah kanan !

No	Soal	Pilihan Jawaban
31	Seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang didalamnya terkandung asas kerohanian negara yaitu...	A. ORDE BARU B. ORDE LAMA
32	Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berfikir seseorang atau golongan disebut...	C. KOMISI YUDISIAL D. MAHKAMAH KONSTITUSI
33	Pada periode ini, terjadi Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit dan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD negara RI Tahun 1945 Salahsatu penyimpangan pada periode ini yaitu Presiden Sukarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi...	E. MAHKAMAH AGUNG F. PANCASILA
34	APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan...	G. HAK ANGKET H. IDEOLOGI
35	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI ) atau perjuangan Rakyat Semesta ( Permesta ) yang dipimpin oleh... dan Ventje Sumual tahun 1957 -1958 di Sumatra dan Sulawesi.	I. TERPIMPIN

36.	<p>Pada era ini Presiden Suharto sebagai tokoh utama dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Masa ini disebut masa...</p>	<p>J. SEKJEN ALI BUDIARDJO</p>
37	<p>DPR adalah lembaga negara pembuat undang – undang atau lembaga legislatif. DPR memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi...</p>	<p>K. SYARIFUDIN PRAWIRANEGORO</p>
38	<p><b>BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA</b>  <b>Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden</b> <span style="float: right;">10</span></p>  <p><b>DPR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (2)***]</li> <li>DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***]</li> <li>Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota [Pasal 7B (3)***]</li> </ul> <p><b>MPR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***]</li> <li>Keputusan diambil dalam sidang paripurna, dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***]</li> </ul> <p><b>MK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***]</li> </ul> <p>Proses: Usul DPR tidak diterima → Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat. Usul DPR diterima → Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan.</p>	<p>L. PENGAWASAN</p> <p>M. DPR</p> <p>N. MPR</p> <p>O. FUNGSI LEGISLASI</p>
39	<p>DPR sesuai pasal 20A ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki hak mengeluarkan pendapat, hak interpelasi dan hak..... untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum.</p>	
40	<p>Lembaga ini berwenang mengusulkan hakim agung (Anggota Mahkamah Agung), menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini disebut....</p>	

## V. Isian

**Kerjakanlah soal nomor 41 sampai dengan 45 dengan cara melengkapi/mengisi titik-titik pada soal-soal di bawah ini !**

41. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949 menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet Presidensial. Namun, dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi ...
42. Perhatikan gambar di bawah ini.



Indonesia mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya.  
Dari ilustrasi pada gambar diatas merupakan bentuk kedaulatan ...

43. Salah satu kekuasaan Presiden sebagai kepala negara yaitu memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan....
44. Lembaga negara ini terbentuk setelah perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Salah satu tugasnya mengajukan rancangan undang – undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembedaan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah disebut ...
45. BPK adalah badan yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh....

-----Kerjakan dengan cermat semoga sukses-----